RENCANA KERJA PERUBAHAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

TAHUN 2024

DIbuat oleh:
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
Jl. Pamenang No.1-C Katang, Sukorejo, Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182,
Email dinkes@kedirikab.go.id, Website dinkes.kedirikab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja) yaitu merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rancangan awal renja juga mengacu kepada Renstra yang telah disusun SKPD pada tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Dokumen Renja mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut :

1. Renja disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan merupakan terjemahan dari visi, misi dan juga program , yang dituangkan di dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Awal Rencana kerja dan Anggaran tahun 2024.

3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam renja dapat dijalankan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan 2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan mengatasi masalah kesehatan nasional, sejalan dengan strategi pemerintahan/ pembangunan mewujudkan penyelenggaraan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang berkelanjutan yang penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Keterkaitan Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rencana Kerja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKP SKPD, KUAPPAS, dan RAPBD.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043;
30. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024;

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai dasar untuk rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi serta untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) perubahan Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program Dinas Kesehatan.
2. meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya.
3. terwujudnya sumberdaya kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.
4. mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat.
5. meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan bidang kesehatan.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2024, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Pemerintah Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Pemerintah Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Pemerintah Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terhadap isi Renja atau pun hal-hal lain sesuai kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2020 semua SKPD mengalami penyesuaian nomenklatur kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019, terkait dengan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 Dinas Kesehatan memiliki menjalankan 4 program 22 kegiatan. Pada rancangan awal renja tahun 2024 kali ini Dinas Kesehatan juga mengalami perubahan dalam program dan kegiatan guna menjalankan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam rancangan awal renja ini kami menyajikan hasil evaluasi renja tahun lalu dengan target tahun berikutnya akan disajikan dalam tabel yang berbeda.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian renstra SKPD s/d tahun 2023
Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

NO	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1						**Urusan Kesehatan**									
1	**‘01**					**Bidang Urusan Kesehatan**									
1	**‘01**	**‘01**	1.02	‘01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan**	**78%**	**78%**	**78%**	**78%**	**100**	**80%**	**158%**	99,5%
			1.02	‘01	201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100**	**300**	75%
			1.02	‘01	201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2	100
			1.02	‘01	201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)	**15 laporan**	**15 laporan**	**15 laporan**	**15 laporan**	**100**	**15 laporan**	**45**	100

			1.02	‘01	202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	100
			1.02	‘01	202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	400	100
			1.02	‘01	202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	**93**	**93**	**93**	**93**	**100**	**95**	**269**	69.5
			1.02	‘01	202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dalam 1 tahun	**93**	**93**	**93**	**93**	**100**	**95**	**269**	69.5
			1.02	**‘01**	**205**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**	100
			1.02	‘01	205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju kerja yang diadakan	0	0	20	20	100	180	40	10
			1.02	‘01	205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang mengalami peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan	80%	80%	80%	80%	100	80%	240	60
			1.02	**‘01**	**206**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100**
			1.02	‘01	206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	2	2	2	2	100	2	6	2
			1.02	‘01	206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	17	17	17	17	100	10	51	12,75
			1.02	‘01	206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	4	4	4	4	100	4	12	3
			1.02	‘01	206.	Penyediaan Bahan	Jenis barang / bahan	80	80	80	80	100	90	240	60

					04	Logistik Kantor	yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun								
			1.02	‘01	206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	7	7	7	7	100	8	21	5.25
			1.02	‘01	206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	2	2	2	2	100	3	6	3
			1.02	‘01	206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	500	500	500	500	100	600	1500	375
			1.02	‘01	206.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dalam 1 tahun	150	150	150	150	100	200	450	112.5
			1.02	**‘01**	**208**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300**	**75**
			1.02	‘01	208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	12	100	48	12
			1.02	‘01	208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	12	100	48	12
			1.02	‘01	208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	12	100	48	12
			1.02	‘01	208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	12	100	48	12
			1.02	**‘01**	**209**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100**
			1.02	‘01	209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100
			1.02	‘01	209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1	10	10	10	10	10	100	400	10

						Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	tahun								
			1.02	‘01	209.05	Pemeliharaan Mebel	Frekuensi pemeliharaan mebelair dalam 1 tahun (kali)	2	2	2	2	100	2	6	3
			1.02	‘01	209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	12	12	12	100	12	36	4
			1.02	‘01	209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	3	3	100	3	9	2.25
			1.02	‘01	209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	3	3	3	3	100	3	9	2.25
			1.02	**‘01**	**20.10**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300**	**75**
			1.02	‘01	20.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan penunjang pelayanan BLUD	37 puskesmas	37 puskesmas	37 puskesmas	37 puskesmas	100	37 puskesmas	37	100
			1.02	**‘02**		**"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat"**	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	12%	12%	49%	41.6%	84.89	49%	36	4
							Indeks Keluarga Sehat	0,14	0,14	0,17	0,201	111	0.23		
							Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	78,5%	78,5%	85%	95.1%	101	78,5%		
							Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	15%	15%	100%	100%	100	17%		
							AKI	83,8	83,8	83,8	138.5	165	79,23		
							AKB	7,1	7,1	7,1	7.2	101	6,9		
			1.02	**‘02**	**201**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	75

						Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan								
			1.02	‘02	201.02	Pembangunan puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	75
			1.02	‘02	201.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	16,7% (7/42)	100	38,1% (9/35)	50.1	12.52
			1.02	‘02	201.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	75%	75%	77%	77%	100	82%	229	57.25
			1.02	‘02	201.15	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	100 alat	100 alat	100 alat	100 alat	100	108 alat	300	75
			1.02	‘02	201.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	37 pusk	37 pusk	37 pusk	37 pusk	100	37 pusk	37	100
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan								
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makmin ke puskesmas serta faskes lainnya	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	75
			1.02	**‘02**	**202**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat**	**75%**	**75%**	**78%**	**78%**	**100**	**85%**	**231**	**57.75**

						Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**daerah (Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap)**								
			1.02	‘02	202.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89%	89%	89%	81.38	91.4%	90%	260	65.75
			1.02	‘02	202.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92%	92%	92%	87.57	95.2%	94%	278	69.5
			1.02	‘02	202.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94%	94%	94%	86.91	92.45	95%	275.91	68.98
			1.02	‘02	202.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77%	77%	77%	77.53	100	80%	234	58.5
			1.02	‘02	202.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55%	55%	55%	77	140	70%	202	50.5
			1.02	‘02	202.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	39.87	39.87	100%	239	59.9
			1.02	‘02	202.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50%	50%	50%	53.51	107	55%	158.5	39.6
			1.02	‘02	202.08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	25.96	25.96	100%	225	56.25
			1.02	‘02	202.09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	92.78	92.78	100%	400	100
			1.02	‘02	202.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	100%	100%	100%	119.07	119.07	100%	319	79.75

							Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								
			1.02	‘02	202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	100%	100%	25.38	25.38	100%	325	81.25
			1.02	‘02	202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	100%	100%	68.82	68.82	100%	368	92
			1.02	‘02	202.13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0	100%	100%	100%	100%	100%	400	100
			1.02	‘02	202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	88%	88%	88%	85%	100%	90%	276	69
			1.02	‘02	202.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	40 Pos	40 Pos	40 Pos	45	105	45 Pos		
			1.02	‘02	202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	62,30%	62,30%	62,30%	60	92	70,00%	222	169
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
			1.02	‘02	202.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6	6	6	5	90	6	18	
			1.02	‘02	202.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan								
			1.02	‘02	202.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%

							Kesehatan								
			1.02	‘02	202.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘02	202.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	70%	70%	70%	70%	100	85%	210	70
			1.02	‘02	202.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	70%	70%	70%	70%	100	85%	210	70
			1.02	‘02	202.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘02	202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100	20	20	
			1.02	‘02	202.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	37 pkm	37 pkm	37 pkm	37 pkm	100	37 pkm	37 pkm	100
			1.02	‘02	202.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘02	202.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	3 puskesmas	3 puskesmas	3 puskesmas	5 puskesmas	100	5 puskesmas	5 puskesmas	100
			1.02	‘02	202.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘02	202.37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan			100%	100%	100%	100%	400	100%

							Respon Wabah								
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			100%	100%	100%	100%		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100%	100%	100%	100%		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100%	100%	100%	100%		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			100%	100%	100%	100%		
			1.02	**‘02**	**203**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan**	**37 pkm**	**37 pkm**	**37 pkm**	**37 pkm**	**100**	**37 pkm**	**37 pkm**	**100**
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	38 dokumen	38 dokumen	38 dokumen	38 dokumen	100	38 dokumen	38 dokumen	100
			1.02	**‘02**	**204**	**"Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"**	**Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘02	204.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3	3	3	3	100	3	9	100

			1.02	**‘03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**100**	**70%**	**210**	**70%**
			1.02	**‘03**	**201**	**Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten / kota**	**Jumlah ijin praktik yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
			1.02	‘03	201.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	75%	75%	75%	75%	100	75%		75%
			1.02	‘03	201.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	**‘03**	**202**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya perencanaan SDM Kesehatan di Fasiliatas Kesehatan Pemerintah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
			1.02	‘03	202.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘03	202.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	‘03	202.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	**‘03**	**203**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan**	**Perentase ASN yang dikembangkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**

						Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**kompetensinya**								
			1.02	‘03	203.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10	10	10	10	100	10	40	
			1.02	**‘04**		**"Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman"**	**PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**100**	**75%**	**75%**	**100**
			1.02	**‘04**	**201**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, UMOT**	**JUMLAH REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT YANG DITERBITKAN**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**100**	**75%**	**75%**	**100**
			1.02	‘04	201.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20	20	20	20	100	20	20	100
			1.02	**‘04**	**203**	**"Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga "**	**JUMLAH SERTIFIKAT P-IRT YANG DITERBITKAN**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**

			1.02	**‘04**	**203.01**	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	120	120	120	120	100	120	360	90
			1.02	**‘04**	**206**	**"Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga "**	**PROSENTASE PEMERIKSAAN PRODUKSI MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400**	**100%**
			1.02	‘04	206.01	"Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan"	Persentase produsen industri rumah tangga yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
	1	02	04	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**									
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan								

						Depot Air Minum (DAM)	Depot Air Minum (DAM)								
	1	02	04	2.05		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**									
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								
	1	02	04	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**									
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan								
			1.02	**‘05**		**"Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan"**	**Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	**‘05**	**201**	**"Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "**	**frekuensi kegiatan tim pokjanal tk. Kabupaten, kecamatan dan desa dalam satu tahun**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%

			1.02	‘05	201.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
			1.02	**‘05**	**202**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah media KIE yang digunakan dalam satu tahun**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400	100%
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								

2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD

Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun 2023 dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan yaitu sebesar 85%% (Rp. 255.423.255.502,53) dari total dana Rp 300.467.979.726,-

Sedangkan untuk mengukur kinerja maka diukur Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2022.

Penetapan indikator pelayanan kesehatan di kabupaten Kediri disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten.Dalam menilai tingkat kinerja pelayanan ini Dinas kesehatan Kabupaten Kediri diwajibkan memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKK bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Kediri, terdapat 8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur keberhasilan pelayanan kesehatan, dimana setiap tahun indikator ini diukur pencapaiannya dengan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Berikut akan disampaikan gambaran pencapaian Indikator Kinerja baik IKK maupun SPM.

tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

No.	Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke -				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun				tahun		tahun		
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13
1	Angka Kematian Ibu	-	56.58	64,67	60,63	60,63	56,58	138.5	57	61	61	
2	Angka Kematian Bayi	-	7.00	7,6	7,3	7,3	7	7.2	6.4	6	6	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83.75%	84	85	85	85	81.01	81.21	84.62	84.62	
4	Persentase Keluarga Sehat	-		100%	100%	100%	100%	100	100			
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		93	94	94	95	81.3	76,92	92.89	92.89	
6	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		95	96	96	97	87.57	78,70	94.38	94.38	
7	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		97	98	98	99	86.91	80,94	96.52	96.52	
8	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		82	84	84	86	77.53	78,98	84.90	84.90	
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	100%	100%	100%	77.00	83,29	95.82	95.82	
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	100%	100%	100%	39.87	42,41	28.33	28.33	

11	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		66%	67%	67%	68%	53.51	67,68	69.71	69.71
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	100%	100%	100%	25.96	39,64	19.29	19.29
13	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100%		100%	100%	100%	100%	92.78	137,53	29.40	29.40
14	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%		100%	100%	100%	100%	119.07	118,61	100	100
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)	100%		45%	50%	55%	60%	25.38	65,08	100	100
16	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%		60%	65%	70%	75%	68.82	89,36	87.76	87.76

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

Isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengacu pada empat indikator pembangunan kesehatan, yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas), Angka/Umur Harapan Hidup, Status Gizi Masyarakat.

A. Mortalitas (Angka Kematian)

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Angka Kematian yang terkait adalah Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita serta Kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan dan bencana alam.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

   Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Angka Kematian Ibu menurun dengan signifikan hal ini karena ditahun ini merupakan tahun ke 3 pandemi sudah siap menghadapinya, dengan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari mutu dan kualitasnya . AKI turun dari angka 29 menjadi angka 11 ditahun 2022 Penyebab kematian ibu masih berkutat pada Pre Eklamsia sebanyak 45 %, perdarahan 27% sisanya penyebab lain-lain sebanyak 27%. Usia kematian ibu terbanyak pada golongan usia produktif sebanyak 73 %.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

   Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Seiring dengan hal tersbut Angka Kematian bayi juga turun menjadi 122 bayi . dengan penyebab terbanyak kematian neonatal adalah Asfiksia 31,73%, BBLR 21,15 kelainan bawaan 25,96 dan sepsis 25, 96 %. Sedangkan untuk Post Natal Pneuomonia 72,22%, diare 5,56% dan Kelainan kongenental sebanyak 5,56%

B. Morbiditas (Angka Kesakitan)

Morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu morbiditas juga berperan dalan penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol terutama TB, Malaria, HIV/AIDS, DBD dan Diare

C. Angka/Umur Harapan Hidup (UHH)

Peningkatan Angka/Umur Harapan Hidup merupakan salah satu faktor yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi pada suatu wilayah. Angka/Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk dari sejak lahir pada suatu wilayah. Angka/Umur Harapan Hidup digunakan untuk menilai derajat kesehatan dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Angka/Umur Harapan Hidup untuk Kabupaten Kediri pada Tahun 2020 adalah 72.61 , tahun 2021 meningkat menjadi 72.65 sedangkan Tahun 2022 adalah 72.97

D. Status Gizi Masyarakat

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara mengetahui status gizi balita adalah dengan menggunakan metode antropometri. Dalam metode antropometri, indeks yang umum dipakai adalah Berat Badan menurut Umur (BB/U) yang kemudian dikategorikan dalam Berat Badan Lebih (Z score> +2 SD), Berat Badan Normal (Z score -2 SD sampai +2 SD), Berat Badan Kurang (Z score < -2 SD sampai -3 SD) dan Berat Badan Sangat Kurang (Z score < - 3 SD).

Berdasarkan data, jumlah balita yang ditimbang pada Tahun 2021 yaitu 88.95 balita. Sedangkan distribusi status gizi balita,sebanyak 95,0 % balita yang ditimbang mempunyai berat badan normal, 3,4 % balita mempunyai berat badan kurang, 0,6 % balita mempunyai berat badan sangat kurang dan 1,0 % balita mempunyai berat badan lebih.

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan

pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

1) Pelayanan kesehatan balita sehat.
2) Pelayanan kesehatan balita sakit

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi: a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan: (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun. (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun. (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. (4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun. (5) Pemberian imunisasi dasar lengkap. b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan: (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.

Adapun untuk menggambarkan keberhasilan program penimbangan di Posyandu di wilayah Kabupaten Kediri, salah satu ukuran yang digunakan adalah dari kenaikan berat badan balita. Sehingga ibu balita berusaha untuk memberi asupan yang seimbang agar pada bulan penimbangan berikutnya berat badan balitanya meningkat secara signifikan.

Upaya-upaya perbaikan gizi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri meliputi :

1. Pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan balita, serta kepada ibu nifas.

   Strategi penanggulangan Kurang Vitamin A dilaksanakan melalui pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi yaitu kapsul vitamin A biru untuk bayi (6-11 bulan) sebanyak satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari atau Agustus, dan kapsul vitamin A merah untuk anak balita (1-5 tahun) sebanyak dua kali setahun yaitu tiap bulan Februari dan Agustus.

   Berdasarkan laporan bulanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, cakupan pemberian kapsul vitamin A selama empat tahun terakhir sudah mengalami pencapaian sebanyak 90%.

   Hasil pencapaian tersebut dipengaruhi oleh jumlah sasaran berdasarkan perkiraan penduduk, keaktifan petugas mendistribusikan kapsul vitamin A dan ibu balita yang menyadari akan pentingnya kapsul vitamin A bagi balitanya.

2. ASI eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai berusia 6 bulan tanpa diberi makanan lain selain ASI. ASI merupakan makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi karena mengandung semua unsur gizi yang dibutuhkan bayi guna pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Berdasarkan laporan bulanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri pencapaian pemberian ASI eksklusif masih cukup rendah, hanya berkisar antara 70-75%, sedangkan sampai akhir tahun 2021 masih tercatat 62.6% dari total bayi yang ada di Kabupaten Kediri.

Untuk menghitung cakupan ASI eksklusif dilakukan dengan cara menjumlah semua bayi mulai umur 0 – 6 bulan yang diberi ASI eksklusif dan dibandingkan dengan jumlah bayi yang diperiksa. Sosialisasi pemberian ASI eksklusif melalui lintas sektor dan program, posyandu, LSM, PKK, serta tokoh masyarakat sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberian ASI eksklusif. Adanya penurunan capaian ASI eksklusif dalam satu tahun terakhir dikarenakan masih belum tertibnya pencatatan dan pelaporan dari desa.

3. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi yang dimaksud adalah status/keadaan gizi berdasarkan Berat Badan menurut Umur (BB/U < -3 SD). Kasus gizi buruk dapat terjadi karena keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan rendahnya konsumsi energi (karbohidrat, protein dan lemak) dalam makanan sehari-hari dan atau disertai penyakit infeksi, sehingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan sering disertai dengan kekurangan zat gizi mikro (vitamin dan mineral).

Sampai dengan akhir Tahun 2021 balita gizi buruk yang ditemukan adalah sejumlah 83 orang, semuanya mendapatkan intervensi dari Dinas Kesehatan maupun sumber lain berupa Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berupa susu balita.

Pada tahun 2021 Kabupaten Kediri menjadi daerah lokus stunting, dimana penanganan gizi buruk tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan tetapi merupakan tugas dari semua elemen masyarakat dan semua sektor terkait dengan penanganan stunting.

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan di bidang kesehatan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah dengan pertimbangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pencapaian SPM kesehatan. Adapun rencana kerja tahun 2024 dan kebutuhan anggaran tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024		Pagu		Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Ket
					Semula	Menjadi	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
01	**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	75%	100%	116.465.579.120	151.672.787.954	35.207.208.834	DAU/APBD	
01.01	**Perencanaan, penganggaran dan evaliasi kinerja perangkat daerah**	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	95.010.600,00	130.324.700,00	35.314.100,00	DAU/APBD	
01.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Rentra, Renja)	100%	100%	100%	100%	39.900.000,00	39.900.000,00	-	DAU/APBD	
01.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan dalam 1 tahun (Lap bulanan, semesteran, tahunan)	100%	100%	100%	100%	55.110.600,00	90.424.700,00	35.314.100,00	DAU/APBD	
01.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	113.985.319.740,00	149.564.684.174,00	35.579.364.434,00	DAU/APBD	
01.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	111.566.321.976,00	147.148.718.410,00	35.582.396.434,00	DAU/APBD	
01.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan administrasi (penerima honor)	100%	100%	100%	100%	1.024.957.764,00	1.164.857.764,00	139.900.000,00	DAU/APBD	
01.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan	Jumlah dokumen	100%	100%	100%	100%	1.136.280.000,00	995.280.000,00	(141.000.000,00)	DAU/APBD	

	pengujian/verifikasi keuangan SKPD	laporan keuangan dalam 1 tahun									
01.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan Keuangan Yang disusun selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	126.820.000,00	247.388.000,00	120.568.000,-	DAU/APBD	
01.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (Keu)	Laporan Keuangan Yang disusun selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	130.940.000,00	8.440.000,00	(122.500.000,00)	DAU/APBD	
01.05	**Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah**	Cakupan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	55.954.000,00	55.954.000,00	0	DAU/APBD	
01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah baju kerja yang diadakan	100%	100%	100%	100%	55.954.000,00	55.954.000,00	0	DAU/APBD	
01.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	300.928.900,00	367.315.800,00	66.386.900,00	DAU/APBD	
01.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik dalam 1 tahun (kali)	6 pkt	100%	6 pkt	10 pkt	44.496.600,00	92.496.600,00	48.000.000,00	DAU/APBD	
01.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Frekuensi pembelian peralatan rumah tangga dalam 1 tahun (kali)	4 kali	100%	4 kali	4 kali	33.614.300,00	43.467.200,00	9.852.900,00	DAU/APBD	
01.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis barang / bahan yang tersedia /di adakan dalam 1 tahun	80	100%	80	90	162.827.800,00	162.827.800,00	0	DAU/APBD	
01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan	7	100%	7	7	59.990.200,00	59.990.200,00	0		
01.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu dalam 1 tahun	500	400	0	200	0	8.535.000,00	8.535.000,00		
01.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	1.092.970.380,00	1.096.364.380,00	(3.394.000,00)		
01.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Frekuensi kegiatan pelayanan surat	100%	100%	100%	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	0		

		menyurat dalam 1 tahun (kali)									
01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekruensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun (kali)	12	100	12	12	521.624.380,00	521.624.380,00	0		
01.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	12	100	12	12	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,-		
01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Frekuensi kegiatan pelayanan umum kantor dalam 1 tahun (kali)	12	100	12	12	509.846.000,00	493.240.000,00	(16.606.000,00)		
01.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	935.395.500,00	458.143.900,00	(477.251.600,00)		
01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya dalam 1 tahun	10	10	10	10	20.000.000,00	20.000.000,00	0		
01.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam 1 tahun	10	10	10	10	629.433.700,00	214.433.700,00	(415.000.000,00)		
01.09.06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Frekuensi pemeliharaan alat kantor dalam 1 tahun (kali)	100%	100%	100%	100%	135.210.200,00	177.710.200,00	42.500.000,00		
01.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Frekuensi pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun (kali)	100%	100%	100%	100%	150.751.600,00	46.000.000,00	(104.751.600,00)		
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Tersedianya	100%	100%	100%	100%	85.477.452.473,00	96.161.814.037,00	10.684.361.564,00	BLUD	

		penunjang dan pelayanan BLUD								Puskesmas	
1.02.01.2.10.01	**Pelayanan dan Penunjang BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	37 Puskesmas	37 Puskesmas	37 Puskesmas	37 Puskesmas	85.477.452.473,00	96.161.814.037,00	10.684.361.564,00	BLUD Puskesmas	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESMAS**										
02.01	**Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/Kota**	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**13.485.411.464,00**	**31.822.641.695,00**	**18.337.230.231,00**		
02.01.02	Pembangunan puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun					2.571.000.000,00	17.475.651.206,00	14.904.651.206,00	DAU/DBHCT PAJAK ROKOK	
02.01.06	Pengembangan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					346.837.962,00	4.796.591.773,00	4.449.753.811,00	DAU/DBHCT PAJAK ROKOK	
02.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas					206.985.762,00	206.985.762,00	0		
02.01.14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan					1.340.910.840,00	2.147.080.000,00	806.169.160,00		

		Kesehatan yang Disediakan									
2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					160.550.000,00	547.079.000,00	386.529.000,00		
02.01.23	Pengadaan obat, Bahan Habis Pakai, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					8.369.642.900,00	6.309.653.954,00	(2.059.988.946,00)		
2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan					339.600.000,00	339.600.000,00	0		
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**131.961.769.050,00**	**149.731.579.270,00**	**17.769.810.220,00**		
2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					165.620.000,00	165.620.000,00	0		
2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					276.739.900,00	126.739.900,00	(150.000.000,00)		
2.02.003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan					97.499.800,00	469.983.540,00	372.483.740,00		

		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
2.02.004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					149.961.000,00	149.961.000,00	0		
2.02.005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					162.189.000,00	162.189.000,00	0		
2.02.006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					162.873.400,00	162.873.400,00	0		
2.02.007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					92.273.800,00	92.273.800,00	0		
2.02.008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					138.795.000,00	138.795.000,00	0		
2.02.009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1.649.708.700,00	2.103.058.500,00	453.349.800,00		
2.02.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					291.089.700,00	291.089.700,00	0		

		Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar									
2.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					1.443.526.600,00	1.429.952.000,00	(13.574.600,00)		
2.02.012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					517.889.800,00	544.701.500,00	26.811.700,00		
2.02.013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar					11.940.000,00	11.940.000,00	0		
2.02.014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					13.044.000,00	13.044.000,00	0		
2.02.015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					701.353.000,00	2.502.031.800,00	1.800.678.800,00		
2.02.016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan					64.999.800,00	64.999.800,00	0		

		Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
2.02.017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1.184.100.000,00	1.369.505.000,00	185.405.000,00		
2.02.018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0	300.879.560,00	300.879.560,00		
2.02.019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					103.282.700,00	103.282.700,00	0		
2.02.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					472.987.500,00	180.504.250,00	(292.483.250,00)		
2.02.021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					83.625.000,00	0	(83.625.000,00)		
2.02.022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0	42.408.000,00	42.408.000,00		
2.02.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1.509.395.950,00	3.983.602.100,00	2.474.206.150,00		
2.02.026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Jumlah Dokumen					121.520.638.400,00	134.327.391.800,00	12.806.753.400,00		

	Masyarakat	Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
2.02.028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					19.997.500,00	104.274.500,00	84.277.000,00		
2.02.029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					50.000.000,00	50.000.000,00	0		
2.02.034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0	16.524.000,00	16.524.000,00		
2.02.035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					115.232.000,00	0	(115.232.000,00)		
2.02.036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					100.370.000,00	106.170.000,00	5.800.000,00		
2.02.037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					74.202.000,00	74.202.000,00	0		
2.02.038	Penyediaan dan Pengelolaan	Jumlah Public Safety					381.260.000,00	381.260.000,00	0		

	Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
2.02.041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					407.174.500,00	0	(407.174.500,00)		
2.02.042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0	2.412.800,00	2.412.800,00		
2.02.046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					0	259.909.620,00	259.909.620,00		
2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas)**						25.275.883.000,00	25.275.883.000,00	0	BOK Puskesmas	
2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**						**184.860.00.0**	**378.006.353,00**	**193.146.353,00**		
2.03.002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					184.860.000	378.006.353,00	193.146.353,00		
2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**532.638.000,00**	**667.268.800,00**	**134.630.800,00**		

2.04.003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					472.769.000	607.399.800,00	134.630.800,00		
2.04.004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					59.869.000	59.869.000	0		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						599.433.200,00	2.194.316.400,00	1.594.883.200,00		
1.02.03.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						7.274.800	7.274.800	0		
1.02.03.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					7.274.800	7.274.800	0		
1.02.03.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						224.758.400,00	201.740.100,00	(23.018.300,00)		
1.02.03.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia					9.799.600	9.799.600	0		

		Kesehatan									
1.02.03.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					214.958.800	191.940.500,00	(23.018.300,00)		
1.02.03.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
1.02.03.02.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					367.400.000	1.985.301.500,00	1.617.901.500,00		
02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**656.119.000,00**	**656.119.000,00**	**0**		
04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**						**63.730.000,00**	**65.930.000,00**	**2.200.000,00**		
04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					63.730.000,00	65.930.000,00	2.200.000,00		
04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**						**235.300.000,00**	**241.600.000,00**	**6.300.000,00**		

	dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
004.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						235.300.000,00	241.600.000,00	6.300.000,00		
04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**						**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**0**		
04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					85.000.000,00	85.000.000,00	0		
04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**						**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0**		
04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah Dokumen					55.000.000,00	55.000.000,00	0		

	serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									
04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**						**217.089.000,00**	**208.589.000,00**	**(8.500.000,00)**		
04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan					217.089.000,00	208.589.000,00	(8.500.000,00)		
02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**										
02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**787.350.400,00**	**1.385.529.462,00**	598.179.062,00		
05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					787.350.400,00	1.385.529.462,00	598.179.062,00		

05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**208.818.667,00**	**65.000.000,00**	**(143.818.667,00)**		
05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					208.818.667,00	65.000.000,00	(143.818.667,00)		
05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**14.999.800,00**	**38.005.900,00**	**23.006.100,00**		
05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					14.999.800,00	38.005.900,00	23.006.100,00		

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024. Renja Perubahan Dinas Kesehatan yang telah disusun menggambarkan perubahan anggaran dan target kinerja setalh evaluasi dilakukan, perubahan anggaran meningkat sebesar Rp. 84.008.314.518,00, dari DPA awal sebesar Rp. 376.040.637.353,00 , menjadi sebesar Rp. 460.048.951.871, Penambahan ini berasal dari peningkatan alokasi yang bersumber dari DBHCHT, Pajak Rokok dan Insentif fiscal serta penambahan BLUD Puskesmas

Renja perubahan merupakan hal yang penting dan sangat perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri.

Demikian Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, keseluruhan program ini diharapkan dapat diaktualisasi sesuai visi, misi Kabupaten Kediri dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam hubungan yang dinamis dan sinergi.

Kediri, Agustus 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI

dr. Ahmad Khotib
Pembina Utama Muda
NIP. 197003242002121003

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA